

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Langkah-Langkah Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	20
B. Asas-Asas Yang Terkait Bantuan Hukum	24
1. Asas Kedudukan Yang Sama Di Muka Hukum	25
2. Asas Praduka Tidak Bersalah	28
3. Asas Mendapatkan Bantuan Hukum	30
C. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum	33
BAB III PENOLAKAN TERDAKWA DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	

A. Penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Bandung	36
B. Akibat hukum dari penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.....	52

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	61
-----------------	----

Saran.....	62
------------	----

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

